

**PERANAN PEMERINTAH DALAM PENGATURAN HAK
KESEHATAN BURUH YANG BERKEADILAN DALAM
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat sarjana S-2

Program Studi Magister Hukum Kesehatan



diajukan oleh
Iman Firmansyah
NIM: 12.93.0034

kepada

FAKULTAS PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2018

TESIS

PERANAN PEMERINTAH DALAM PENGATURAN HAK KESEHATAN BURUH YANG BERKEADILAN DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL



**FAKULTAS PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM KESEHATAN**

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234
Tel. (024) 8441555 , 8505003(hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265
e-mail: mh.kes@unika.ac.id http://www.unika.ac.id



PENGESAHAN

Tesis di susun oleh :

Nama : IMAN FIRMANSYAH

Nim : 12.93.0034

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada hari / tanggal : Sabtu, 03 Februari 2018

Dosen Pengaji :

1. Dr. Endang Wahyati Y, SH., MH)
2. dr. Siswo Putranto, SH., SpF., MH.Kes)
3. Prof. Dr. Agnes Widanti S, SH.CN)

Tesis ini telah diterima sebagai satu persyaratan untuk memperoleh gelar dalam pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kesehatan.

Pada hari / tanggal : Sabtu, 03 Februari 2018

(Dr. Endang Wahyati Y, SH., MH)

Ketua Program Studi
Magister Hukum

PROGRAM PASCA
MAGISTER HUKUM KES
HEATAN

PENGESAHAN

Tesis disusun oleh:

Nama: Iman Firmansyah

NIM: 12.93.0034

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada hari/ tanggal : Sabtu, 03 Februari 2018

Susunan Dewan Pengaji

Dosen Pengaji:

- 
1. Dr. Yustina Endang Wahyati, SH, MH (.....)
 2. dr. Siswo P. Santoso, SH, MHKes, SpF (.....)
 3. Prof. Dr. Agnes Widanti S, SH. CN (.....)

Tesis ini diterima sebagai satu persyaratan untuk memperoleh gelar dalam pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kesehatan.

Pada hari/ tanggal: Sabtu, 03 Februari 2018

(Dr. Yustina Endang Wahyati, SH, MH)

Ketua Program Studi

Magister Hukum Kesehatan

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

Nomor : 0047/SK.Rek./X/2013

Tanggal : 03 Februari 2018

**Tentang : PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI TUGAS AKHIR DAN
TESIS**

TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis yang berjudul:

**“PERANAN PEMERINTAH DALAM PENGATURAN HAK KESEHATAN
BURUH YANG BERKEADILAN DALAM PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL”**

ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata terbukti bahwa tesis ini sebagian atau seluruhnya merupakan **hasil plagiasi**, maka saya rela untuk dibatalkan, dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 16 Januari 2018

Iman Firmansyah

NIM: 12.93.0034

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan tesis ini dapat terselesaikan.

Tesis ini berjudul **“Peranan Pemerintah dalam Pengaturan Hak Kesehatan Buruh yang Berkeadilan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional”**.

Jaminan kesehatan nasional merupakan salah satu program dari Sistem Jaminan Kesehatan Nasional. Penyelenggaraan jaminan sosial dan jaminan kesehatan merupakan salah satu tugas pemerintah. Peranan pemerintah dalam pengaturan hak kesehatan buruh penting untuk dipahami dalam rangka memenuhi hak kesehatan yang berkeadilan terutama bagi kaum buruh.

Dalam kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah memberi bantuan berupa arahan dan dorongan selama penyelesaian studi. Oleh karena itu Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Ibu Dr. Yustina Endang Wahyati, SH, MH dan Bapak dr. Siswo P. Santoso, SH, MHKes, SpF selaku Dosen Pembimbing, Prof. Dr. Agnes Widanti S, SH. CN selaku Dosen Penguji yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing, dan memberikan dorongan sampai tesis ini terwujud.

Selanjutnya penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

- 
- a. Prof. Dr. F. Ridwan Sanjaya, MS.IEC selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
 - b. Prof. Dr. Ing. LMF. Purwanto selaku Dekan dan Para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
 - c. Dr. Yustina Endang Wahyati, SH, MH selaku Ketua Program Studi Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dan beserta seluruh staf pengajar di Program Studi Hukum Kesehatan yang telah mengisi dan menambah pengetahuan/ wawasan maupun teladan;
 - d. dr. Ditha Diana, SH, MH, MKK, AAK, SpPA dan ananda Syafiq Al Farisi Firmansyah atas segala dukungan; semangat; dan motivasinya sehingga tesis ini dapat terlesesaikan;
 - e. Keluarga beserta saudara-saudaraku tercinta, atas doa restu dan segala dukungannya baik moril maupun materil;
 - f. Teman-teman mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, yang telah memberikan sumbangan pikiran dan semangat hingga penulisan tesis ini selesai;
 - g. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang juga telah ikut memberikan bantuan dan sumbangan dalam berbagai bentuk, mulai dari pelaksanaan penelitian hingga penulisan tesis ini.

Penulis berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat dalam bidang pendidikan ilmu hukum kesehatan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. PERUMUSAN MASALAH.....	17
C. TUJUAN PENELITIAN	17
D. MANFAAT PENELITIAN	17
E. METODE PENELITIAN	18
1. Metode Pendekatan.....	18
2. Desain Penelitian	19
3. Spesifikasi Penelitian	19
4. Unsur Penelitian	19
5. Jenis Data	20
6. Metode Pengumpulan Data	20
7. Metode Penyajian Data	21
8. Metode Analisis	21
F. SISTEMATIKA TESIS	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. HAK KESEHATAN BURUH	24
B. TEORI KEADILAN	37
C. TEORI TENTANG PERANAN PEMERINTAH	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. HASIL PENELITIAN	52
B. PEMBAHASAN	62
1. Pengaturan Hak Kesehatan Buruh	62

a. Dasar Hukum Hak Kesehatan Buruh	62
b. Bentuk Pengaturan Hak Kesehatan Buruh	72
c. Tujuan Pengaturan Hak Kesehatan Buruh.....	75
2. Peranan Pemerintah dalam Pengaturan Hak Kesehatan Buruh yang Berkeadilan dalam Program JKN	78
a. Bentuk Peran Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Buruh yang Berkeadilan dalam Program JKN	78
b. Sifat Peran Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Buruh yang Berkeadilan dalam Program JKN	82
c. Pelaksanaan Peran Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Buruh yang Berkeadilan dalam Program JKN	85
d. Hak Kesehatan Buruh yang Berkeadilan dalam Program JKN ...	91
BAB IV PENUTUP	99
A. KESIMPULAN	99
B. SARAN	100
DAFTAR PUSTAKA.....	103

ABSTRAK

Jaminan kesehatan yang menjadi salah satu hak buruh merupakan salah satu program dari Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hak kesehatan buruh yang dimaksud pada penelitian ini adalah hak atas upaya kesehatan ditujukan untuk melindungi buruh agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan maupun bukan oleh pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang hak kesehatan buruh yang berlaku saat ini dan mengetahui peranan pemerintah dalam mengatur masalah hak kesehatan buruh yang berkeadilan dalam program JKN. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan juga literatur yang membahas permasalahan yang diajukan. Data bersumber dari peraturan perundangan dan studi pustaka. Objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.

Pemenuhan hak kesehatan buruh diwujudkan melalui pelaksanaan program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Subjek pertanggungannya adalah seluruh buruh beserta keluarganya dengan sistem iuran berupa persentase dari upah/ gaji. Jika ingin meningkatkan jumlah anggota keluarga yang ditanggung dan/ atau ingin meningkatkan perluasan objek pertanggungan, buruh dapat mewujudkannya dengan penambahan iuran. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan distributif, dimana seorang buruh akan mendapatkan haknya atas pelayanan kesehatan sesuai dengan apa yang dia keluarkan.

Pemerintah menjalankan peran imperatif dan peran fakultatif dalam pengaturan hak kesehatan buruh. Peran imperatif terlihat dari sifat kepesertaan yang wajib bagi setiap buruh. Peran yang bersifat fakultatif terlihat dari pengaturan sistem kesehatan dan pembiayaan kesehatan; sistem rujukan; pengadaan sarana, prasarana dan infrastruktur; serta pengadaan obat. Dengan adanya program JKN menyebabkan terciptanya sistem yang berkeadilan dimana setiap buruh bertanggung jawab atas dirinya dengan persentase iuran yang relatif sama. Peranan pemerintah ini membuat hak kesehatan buruh menjadi lebih merata sehingga diharapkan tercapai keadilan dalam pemenuhan hak kesehatan buruh dalam program JKN.

Kata kunci: peranan pemerintah, hak kesehatan buruh, jaminan kesehatan nasional.

ABSTRACT

Health insurance that became one of the labor rights is one of the programs of the National Health Insurance System (JKN). The labor health right in this study is referred to the health efforts aimed at protecting workers to live healthy and free from health problems and adverse effects caused by work or not by work. This study aims to find out how the current regulation of workers' labor rights and know the role of government in regulating the right issue of workers' health rights in the JKN program. This research is a descriptive research using normative juridical approach that is by analyzing the problems based on the prevailing laws and regulations as well as the literature discussing the problems proposed. The data comes from legislation and literature study. The object of the study is a document of legislation and bibliography.

The fulfillment of the right to health of workers is realized through the implementation of the JKN program organized by BPJS of Health. Subject of coverage is all workers and their families with the contribution system in the form of percentage of salary. If you want to increase the number of family members who are covered and/ or want to increase the extension of the object of coverage, workers can make it happen by the addition of contributions. This is in accordance with the principle of distributive justice, in which the workers shall have they right to health care in accordance with what they expend.

The government carries out imperative roles and facultative roles in regulating the right to health of laborers. The role of the imperative is seen from the characteristic of the compulsory membership of each worker. Facultative roles are evident from health system arrangements and health financing; referral system; procurement of facilities, infrastructure and infrastructure; and the procurement of drugs. The existence of the JKN program led to the creation of a just system in which every worker is responsible for himself with a relatively equal percentage of contributions. The roles of this government makes the right of health workers to be more evenly so that it is expected to achieve justice in fulfilling the right of labor health in JKN program.

Keywords: role of government, right of labor health, national health insurance.